



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon (022) 4235026

Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id

Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : Kep.1587/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk penempatan pegawai yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dan juga kebutuhan organisasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir PNS, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, diberhentikan dan diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali: terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan / atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menimbang : Surat Kepala Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 3323/KPG.04.01/Sekrt tanggal 16 Desember 2021 hal Usulan Jabatan Pelaksana Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana yang namanya tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama melaksanakan tugas;
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

	<p style="font-size: small;">Ditandatangani secara elektronik oleh:</p> <p style="font-weight: bold; font-size: small;">KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,</p> <p style="font-size: x-small;">Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM Pembina Utama Madya</p>
--	---

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : Kep.1587/KPG.04.01/MP/2022

TANGGAL : 31 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	KELAS JABATAN	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
1	GANECA SAKTI, S.M.B.	198209132015032001	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	7	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN, SEKRETARIAT	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	SEKRETARIAT
2	DESKA YUDA AMELLIA, S.E.	198705272015022003	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	6	PENGOLAH DATA PERENCANAAN PENGANGGARAN	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN, SEKRETARIAT	PENGELOLA DATA	SEKRETARIAT
3	RADEN MUHAMMAD DARAJAT	197511242009021002	Penata TK.I (III/d)	S1	5		SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN, SEKRETARIAT	PENGELOLA DATA	SEKRETARIAT
4	DIAN ASRIANI, S.S.T.	197503282007012005	Penata (III/c)	D4	7	PENGELOLA DATA	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN, SEKRETARIAT	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	SEKRETARIAT
5	RITTA YANTI KOSASHI	197901242010012002	Penata Muda (III/a)	S1	7	BENDAHARA	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	BENDAHARA	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
6	DEA RIZALI SAHIDIN, A.Md.	198712292020121004	Pengatur (III/c)	D3	6	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
7	ANA SUHANA	197204152007011010	Pengatur TKI (III/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
8	EKA WANTIKA, S.E., M.Ak	198504142010012014	Penata (III/c)	S2	6	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
9	AMAR	197103052008011004	Pengatur TKI (III/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
10	ANI ROSYANA	197210242007012007	Penata Muda (III/a)	S1	6	PENGELOLA PENGAWASAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
11	ARTANTI KUSUMANINGSIH, S.E., M.M.	198002202011012001	Penata (III/c)	S2	7	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
12	IDA MULYANI	198406102010012003	Pengatur (III/c)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
13	WIWIN KOMARIAH, S.E., M.M.	198106282000032001	Penata (III/c)	S2	6	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
14	DIAN RAKHMAWATI, S.A.P.	197303102007012005	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	6	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
15	WANTI BUDI PRATIWI, A.Md.	198603272020122003	Pengatur (III/d)	D3	6	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT